

ANALISIS HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOGOR

(Analysis of the Constraint on Rural Government Organization Communication at Bogor District)

Azainil

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda 75123

Telp.: +62-0541-747583; E-mail : zainil_unmul@yahoo.com

ABSTRACT

The analysis of communication constraint is important in developing the effective communication. The effectiveness of organization communication is badly necessary due to the increasing complexity and complicatedness of the rural demands and problems, besides there is a local government requirement which insists to conduct the local self government related to the slated-constitutions no. 22 year 1999 which slates about the local otonomy. This research is designed as a correlations descriptive survey. The objectives of this research is to identify the communication constraint which usually appears in the process of rural government organization communication, and to analyze the relationship in the individual factors, situation factors and communications process towards the existed communication constraints. The methods used in this research are the Chi-Square and Correspondence Analysis. The respondents are 132 people spread among the 43 villages of 7 district which represent the 3 developing areas in Bogor regency. The result of the research shows that the communications constraint of the village officials in Bogor regency is at low category, where the dominant kinds of constraints are the lack of knowledge, skill, perception and the difference in communications style, language and the inability in self control in communication. There is no real communication between the individual factor and communication factors the situation factor also does not have any relationship with communication constraint in the rural government organization. The rural relationship is found between the communication process and communication constrain at the rural government organizations in Bogor regency.

Keywords : constraint, rural government, organization communication

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan dilakukan dengan pemberian otonomi daerah. Undang-undang tersebut menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk mampu membangun daerahnya.

Desa, menurut UU No.22 tahun 1999, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah di tingkat bawah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik kedalam maupun keluar organisasi.

Hambatan komunikasi dalam organisasi terjadi pada setiap pola komunikasi

yang ada, yaitu komunikasi dari atas kebawah atau sebaliknya, komunikasi kesamping, dan komunikasi diagonal. Disamping itu hambatan komunikasi dapat terjadi dari unsur-unsur yang ada pada proses komunikasi. Adapun diantaranya yaitu adanya persepsi antara komunikator dengan komunikan tentang suatu makna (Sadli, 1976). Perbedaan persepsi itu terjadi karena kerangka acuan (*frame of reference*) dan kerangka pengalaman (*frame of experience*) antara komunikator dan komunikan berbeda.

Analisis hambatan komunikasi penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Keefektivan komunikasi organisasi sangat diperlukan kerana kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa yang semakin rumit dan kompleks, serta ada tuntutan bahwa pemerintah daerah/desa harus mampu menyelenggarakan program pembangunan daerah secara mandiri berkaitan dengan ditetapkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai otonomi daerah.

Pengembangan efektivitas komunikasi organisasi menuntut upaya-upaya mengurangi hambatan-hambatan komunikasi yang mengganggu terciptanya efektivitas komunikasi dalam organisasi pemerintah desa. Upaya ini

antara lain merupakan usaha untuk menciptakan kemandirian dan profesionalisme aparatur desa dalam menjalankan pembangunan desa, sehingga efektivitas komunikasi dalam organisasi desa menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian didesain sebagai penelitian survey yang bersifat deskriptif dan analisis korelasional. Variabel penelitian ini menggambarkan faktor individu, faktor situasi, proses komunikasi dan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa. Populasi amatan meliputi seluruh desa/lurah yang tersebar di seluruh kabupaten Bogor, memiliki 35 kecamatan, 410 desa dan 15 kelurahan. Jumlah termasuk kategori padat yaitu 3.081.199 jiwa dan pertambahan penduduknya per tahun 764.033 jiwa, kepadatan penduduknya perbulan 66.720 jiwa. Cara pengambilan sampel adalah sebagai berikut : (1) Populasi dikelompokkan menjadi 3 wilayah pembangunan sebanyak 425 desa/kelurahan diambil secara *Stratified Sample* yang mewakili 3 wilayah pembangunan yang satu sama lain memiliki karakteristik yang relatif berbeda; (2) Populasi sampel kedua adalah diambil secara acak sederhana desa-desa dalam setiap wilayah pembangunan tersebut; (3) Setiap desa dari sampel diambil 3 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 1 orang kepala urusan (Kaur), Sehingga jumlah responden seluruhnya adalah 132 orang aparat desa yang tersebar di 43 desa dari 7 kecamatan yang mewakili 3 wilayah pembangunan. Prosedur statistika yang digunakan untuk keperluan analisis data meliputi uji *Chi-Square Analysis* digunakan untuk uji kebebasan antar kategori dan *Correspondence Analysis* digunakan untuk uji pemetaan dua kategori (*Mapping*). Hipotesis dari penelitian ini terdiri dari : (1) terdapat hubungan antara faktor individu dengan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa; (2) terdapat hubungan antara faktor situasi dengan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa; dan (3) terdapat hubungan antara proses komunikasi dengan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Komunikasi

Hambatan komunikasi dalam penelitian ini adalah faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi kelancaran arus informasi dan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa, yang dalam penelitian ini terdiri dari 10 aspek yaitu: (a) pengetahuan, (b) keterampilan, (c) persepsi, (d) bahasa, (e) emosi, (f) perhatian, (g) umur, (h) gaya komunikasi, (i) kredibilitas dan (j) prasangka. Dapat dilihat pada Tabel 1. Secara keseluruhan hambatan komunikasi aparat desa di kabupaten Bogor mempunyai kategori rendah, hal ini dikarenakan umumnya aparat desa sudah berpengalaman terhadap organisasi desa sudah tinggi disamping hampir semua aparat desa berasal dari desa setempat sehingga komunikasi lebih mudah. Hambatan komunikasi dengan arah komunikasi lebih tinggi mempunyai kategori terhadap arah komunikasi sejajar dan lebih rendah. Hambatan komunikasi lebih rendah mempunyai hambatan lebih dominan terhadap hambatan komunikasi sejajar. Hal ini bisa sesuai dengan kenyataan bahwa komunikasi sejajar itu lebih mudah dan tidak sulit jika dibandingkan dengan komunikasi dengan yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

Tabel 1. Rataan skor hambatan komunikasi aparat desa menurut arah komunikasi dan jenis hambatan.

No	Hambatan Komunikasi	Arah Komunikasi			Seluruh/ Total
		Lebih Tinggi	Sejajar	Lebih Rendah	
1.	Pengetahuan	16,75	15,08	16,04	15,96
2.	Keterampilan	16,43	14,78	15,57	15,59
3.	Persepsi	16,60	14,58	15,34	15,51
4.	Bahasa	16,63	14,30	14,73	15,22
5.	Emosi	16,33	14,23	14,77	15,11
6.	Perhatian	15,01	13,62	14,15	14,26
7.	Umur	14,66	13,64	14,27	14,19
8.	Gaya Komunikasi	15,70	14,90	15,30	15,30
9.	Kredibilitas	14,32	13,67	13,76	13,91
10.	Prasangka	13,73	13,52	13,63	13,63
	Total Hambatan	15,62	14,23	14,76	14,88

Keterangan :

Rataan skor hambatan komunikasi :

(a). Rendah < 15

(b). $15 \leq$ Sedang < 25

(c). Tinggi \geq 25

Keseluruhan hambatan komunikasi organisasi pemerintah desa di kabupaten Bogor mempunyai kategori rendah dan sedang. Hambatan komunikasi yang mempunyai kategori sedang adalah hambatan komunikasi karena kurang pengetahuan, kurang

keterampilan komunikasi, perbedaan umur, dan perbedaan gaya komunikasi, sedangkan yang mempunyai hambatan komunikasi dengan kategori rendah adalah hambatan komunikasi karena perbedaan persepsi, kurang menguasai bahasa, emosi, kurang perhatian, kredibilitas rendah dan prasangka negatif.

B. Hubungan Faktor Individu dengan Hambatan Komunikasi

Secara keseluruhan faktor-faktor individu tidak berhubungan nyata dengan hambatan komunikasi. Hubungan nyata hanya terlihat pada hubungan antara pengalaman kerja dengan hambatan komunikasi. Hal dapat jelas bahwa pengalaman kerja sangat penting, karena dengan pengalaman kerja yang baik dapat membantu kita dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan berbagai masalah di dalam pekerjaan. Bahkan ada pepetah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, dengan pengalaman membuat kita lebih tahu dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan datang. Hubungan antara pengalaman kerja dengan hambatan komunikasi berhubungan secara negatif, hal ini berarti bahwa makin tinggi pengalaman kerja sebagai aparat desa maka hambatan komunikasi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya jika pengalaman kerja sebagai aparat desa lebih rendah maka hambatan komunikasinya tinggi. Dengan banyaknya pengalaman seorang aparat desa akan lebih tahu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi organisasi pemerintah desa, sehingga hambatan-hambatan yang berarti dapat dilalui dengan mudah.

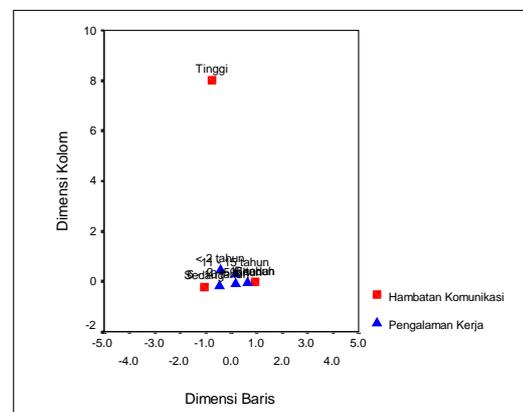
Umur tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan hambatan komunikasi, hal ini jelas bahwa umur aparat desa di kabupaten Bogor relatif sama dan sebagian besar umur aparat desa merupakan umur yang masih produktif yaitu antara 26 – 55 tahun (84,1%). Umur mempunyai hubungan yang bisa positif dan bisa negatif tergantung dari hambatan komunikasinya.

Tinggi rendahnya pendidikan dan banyaknya kursus serta besarnya pendapatan tidak mempunyai hubungan yang nyata terhadap hambatan komunikasi, hal ini menunjukkan bahwa tingginya pendidikan aparat desa tidak menjamin bahwa hambatan komunikasi organisasi pemerintah desa akan lebih rendah begitu juga sebaliknya karena rata-rata pendidikan aparat desa di kabupaten Bogor sudah SLTA ke atas. Kursus tidak mempunyai hubungan yang nyata karena sebagian besar aparat desa di Kabupaten Bogor sebagian besar belum mengikuti kursus, walaupun ada yang

berhubungan dengan dengan pekerjaan aparat desa sedikit sekali bahkan hampir tidak ada, hal ini bisa dilihat bahwa kursus yang diikuti banyak bersifat umum.

Kecenderungan antar profil dari kedua kategori dalam hubungan antara faktor individu dengan hambatan-hambatan komunikasi, dapat diketahui dengan menggunakan analisis korespondensi.

Gambar 1 menunjukkan hubungan pengalaman kerja dengan hambatan komunikasi mempunyai hubungan yang nyata sebagaimana sudah dijelaskan, namun perlu kita lihat bahwa pengalaman kerja 2 – 5 tahun lebih dominan terhadap hambatan komunikasi kategori rendah, dan pengalaman kerja 6 –10 tahun dominan terhadap hambatan komunikasi dengan kategori sedang



Gambar 1. Analisis korespondensi pengalaman kerja dengan hambatan komunikasi

C. Hubungan Faktor Situasi dengan Hambatan Komunikasi

Hubungan antara faktor situasi dengan hambatan komunikasi merupakan hubungan antara gaya kepemimpinan dan tingkat perkembangan desa dengan dengan hambatan komunikasi yang dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan faktor situasi tidak mempunyai hubungan yang nyata terhadap hambatan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi hambatan komunikasi aparat desa, karena kita tahu bahwa aparat desa di kabupaten Bogor hampir semuanya merupakan penduduk asli dan mempunyai pengalaman kerja sebagai aparat desa sudah lama sehingga gaya kepemimpinan mereka sudah banyak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak mempengaruhi hambatan-hambatan komunikasi, demikian juga tentang tingkat perkembangan desa tersebut.

Tabel 2. Hubungan faktor situasi dengan hambatan komunikasi

No	Faktor Situasi	Hambatan Komunikasi			
		χ^2	df	P	e
1.	Gaya Kepemimpinan	9,804	6	0,133	±
2.	Tingkat Perkembangan Desa	0,124	2	0,940	+

Keterangan :

** berhubungan nyata pada tarap $\alpha = 5\%$,

* berhubungan nyata pada tarap $\alpha = 10\%$

e arah hubungan yang disimpulkan dari hasil analisis deskriptif tabulasi silang
 bila + berarti berhubungan secara positif dan - artinya berhubungan secara negatif

D. Hubungan Proses Komunikasi dengan Hambatan Komunikasi

Hubungan antara proses komunikasi dengan hambatan komunikasi merupakan hubungan antara komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, media tatap muka, media Telepon, media surat/memo, media faksimile/e-mail dan kurir.

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses komunikasi mempunyai hubungan yang nyata dengan hambatan komunikasi, kecuali hubungan antara media surat/memo, faksimile/e-mail dan kurir. Komunikasi vertikal mempunyai hubungan yang nyata dengan hambatan komunikasi dengan arah komunikasi positif, hal ini jelas bahwa makin sering orang berkomunikasi ke atas maupun kebawah semakin banyak mendapat hambatan-hambatan komunikasi.

Komunikasi horizontal mempunyai hubungan yang nyata dengan hambatan komunikasi dengan hubungan yang bisa positif dan bisa negatif maksudnya ialah bahwa makin banyak hubungan dengan sesama teman yang selevel hal ini bisa membuat hambatan komunikasi makin rendah atau makin tinggi tergantung situasi dan kondisi nya begitu juga untuk hambatan komunikasi untuk arah diagonal, tatap muka dan melalui telepon.

Surat/memo, faksimile/e-mail dan kurir tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan hambatan komunikasi, hal ini jelas bahwa aparat desa di kabupaten Bogor jarang menggunakan ketiga media tersebut, apalagi mengenai faksimile/e-mail, karena sebagian besar dan bahkan banyak yang tidak mempunyai media tersebut. Keterkaitan antar kategori proses komunikasi dengan hambatan komunikasi maka

kita gunakan analisis korespondensi, dapat terlihat pada Tabel 1 – 3.

Tabel 3. Hubungan proses komunikasi dengan hambatan komunikasi

Proses Komunikasi	Hambatan Komunikasi				
	χ^2	df	P	e	
Arah	Vertikal	10,125**	4	0,038	+
	Horizon-tal	13,550**	4	0,009	±
	Diagonal	14,269**	4	0,006	±
Me-dia	Tatap Muka	13,562**	4	0,009	±
	Telepon	10,699*	6	0,098	-
	Surat/ Memo	0,633	4	0,959	±
	Faksimile /E-mail	4,609	4	0,330	+
	Kurir	4,136	4	0,388	+

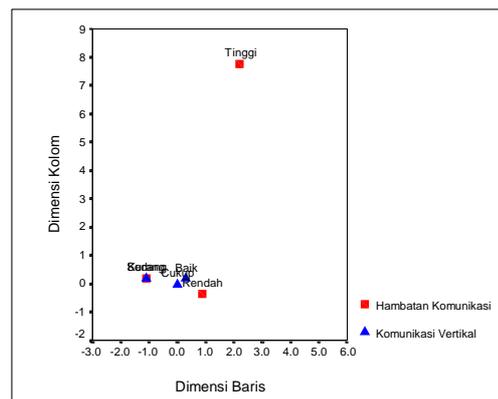
Keterangan :

** berhubungan nyata pada tarap $\alpha = 5\%$,

* berhubungan nyata pada tarap $\alpha = 10\%$ e arah

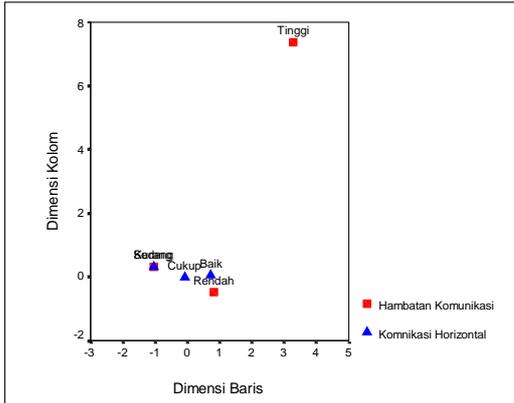
hubungan yang disimpulkan dari hasil analisis deskriptif tabulasi silang,
 bila + berarti berhubungan secara positif dan - artinya berhubungan secara negatif

Komunikasi aparat desa di kabupaten Bogor dengan arah vertikal dominan mempunyai hambatan komunikasi lebih rendah dan sedang. Komunikasi arah vertikal yang baik dominan mempunyai hambatan komunikasi yang rendah sedangkan aparat desa yang mempunyai komunikasi vertikal cukup mempunyai hambatan komunikasi yang sedang (Gambar 2).

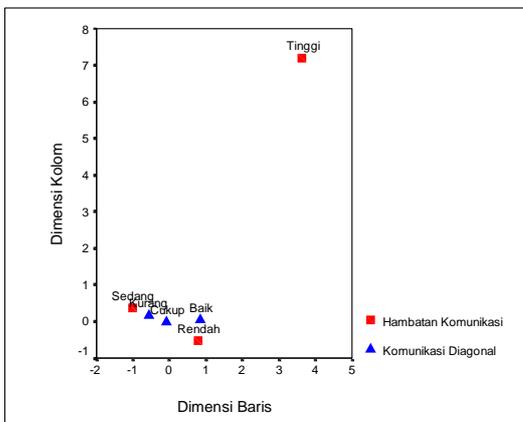


Gambar 2. Analisis korespondensi komunikasi vertikal dengan hambatan komunikasi.

Aparat desa yang komunikasi horizontalnya baik dominan terhadap hambatan komunikasi yang rendah, sedangkan komunikasi horizontal dengan kategori cukup dominan terhadap hambatan komunikasi pada level sedang (Gambar 3).

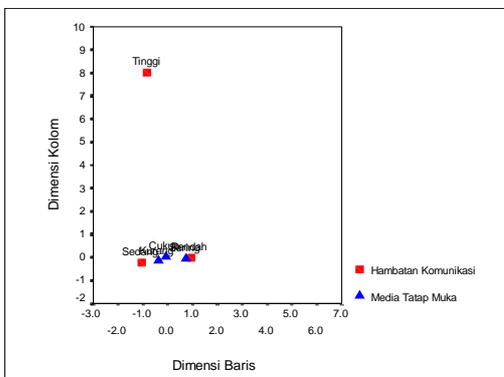


Gambar 3. Analisis korespondensi komunikasi horizontal dengan hambatan komunikasi.



Gambar 4. Analisis korespondensi komunikasi diagonal dengan hambatan komunikasi.

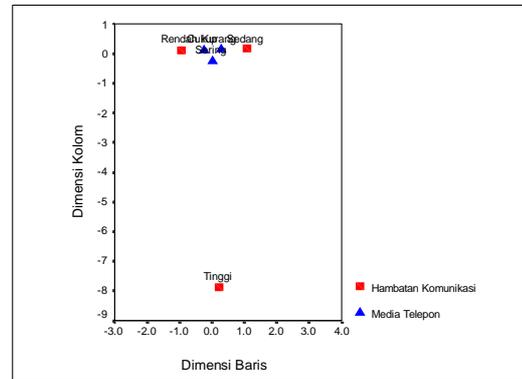
Aparat desa yang menggunakan komunikasi diagonal baik dominan mempunyai hambatan komunikasi yang rendah dan komunikasi diagonal yang kurang dominan terhadap hambatan komunikasi dengan kategori sedang (Gambar 4).



Gambar 5. Analisis korespondensi komunikasi tatap muka dengan hambatan komunikasi

Komunikasi melalui telepon dengan kategori cukup dominan terhadap hambatan komunikasi dengan kategori rendah, dan sedang. Hal ini jelas bahwa komunikasi melalui telepon lebih dominan terhadap kategori sedang dan rendah (Gambar 6).

Demikian juga halnya dengan komunikasi melalui surat/memo juga dominan terhadap hambatan komunikasi rendah dan sedang, hal ini telah ditunjukkan bahwa komunikasi melalui surat dan memo belum begitu memasyarakat di aparat desa baik yang tingkat perkembangannya urban maupun rural. Dari pembahasan hubungan proses komunikasi dengan hambatan komunikasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa ada hubungan yang nyata, hal ini berarti hipotesis terdapat hubungan antara proses komunikasi dengan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa di terima.



Gambar 6. Analisis korespondensi komunikasi melalui telepon dengan hambatan komunikasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hambatan komunikasi aparat desa di kabupaten Bogor termasuk dalam kategori rendah dengan jenis hambatan yang dominan adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya terampil, perbedaan persepsi, ketidaksamaan gaya komunikasi, bahasa dan kurang mampu mengendalikan diri (emosi) dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi lebih banyak dialami pada komunikasi dengan arah lebih tinggi dan lebih rendah jika dibandingkan dengan arah sejajar.
2. Tidak hubungan yang nyata antara faktor individu dengan hambatan komunikasi kecuali faktor pengalaman kerja dengan hambatan komunikasi.

3. Tidak ada hubungan antara faktor situasi dengan hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa.
4. Adanya hubungan yang nyata antara proses komunikasi dengan hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintah desa di kabupaten Bogor.

Wilson, G. L.H., Lloyd G. dan Christopher L.W. 1986. *Organization communication*. Harper & Row Publisher, New York.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1999. Undang-undang otonomi daerah 1999. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim. 2001. Program pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2002-2006. Pemda Kabupaten Bogor, Bogor
- Fiedler, F. E. 1973. *A theory of leadership effectiveness*. McGraw. Hill, New York
- Filley, A.C., R.J. House dan S. Kerr. 1976. *Managerial process and organization behavior*. Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois.
- Gibson, J. L., J. M. Ivancevich dan J. H. Donnelly Jr. 1982. *Organisasi dan manajemen, perilaku, struktur dan proses*. (terjemahan). Erlangga, Jakarta.
- Hersey, P. and Blandhard, K. H. 1978. *Management of organization behavior*. Third Edition. Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.
- Luthans, F. 1985. *Organization behavior*. International Student Edition Book Co, Singapore
- Muhadjir, N. 1983. *Kepemimpinan adopsi inovasi untuk pembangunan Masyarakat*. Rake Press, Yogyakarta.
- Muhammad, A. 2000. *Komunikasi organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Reddin, W. J. 1970. *Managerial effectiveness*. McGraw. Hill, New York.
- Sadli, S. 1976. *Persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang*. Tesis. Universitas Indonesia, Jakarta. (Tidak dipublikasikan).